

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang yang disahkan sejak Januari 2001 pemerintah RI secara resmi telah menetapkan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU no. 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Tadjoeeddin dan Murshed (2007), penyelenggaraan otonomi daerah dimulai secara efektif tanggal 1 Januari 2001 menyebabkan pelaksanaan pemerintah daerah mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good govermance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo 2004).

Menurut Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah paling besar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan keluarnya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berisi ketentuan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang merupakan unsur pokok penopang pembiayaan daerah. Untuk pembiayaan belanja daerah, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah dalam pembiayaan belanja daerah berupa transfer dana Perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak) dan Dana Alokasi Umum sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Payakumbuh merupakan daerah yang mempunyai potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar di Sumatera Barat. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Payakumbuh, perlu dilakukan penelusuran terhadap eksistensi PAD terhadap APBD guna mendapatkan gambaran kemampuan Kota Payakumbuh dalam melaksanakan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah yang terletak pada jalur perdagangan antara Kota

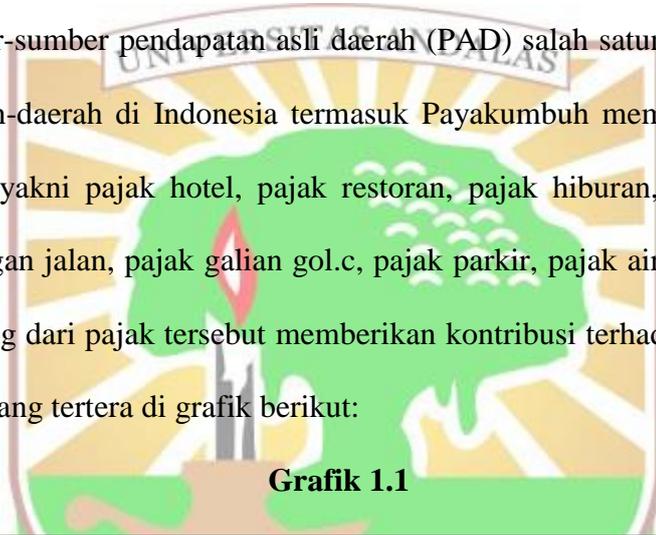
Bukittinggi dan Pekanbaru, Payakumbuh memiliki sumber PAD yang potensial, karena memiliki obyek potensial sebagai sumber penerimaan daerah seperti hotel, restoran, reklame dan sebagainya. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah memungut berbagai jenis pajak dan retribusi, yang pada dasarnya sangat banyak sekali yang berkaitan dengan kondisi Kota Payakumbuh sebagai daerah yang strategis.

Untuk tahun 2015 Pemko Payakumbuh berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemko Payakumbuh akan memaksimalkannya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, sumber-sumber berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah bisa dimaksimalkan. Pemko Payakumbuh terus berupaya meningkatkan PAD dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Untuk mewujudkan penerimaan PAD Payakumbuh melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan membentuk BUMD Kota Payakumbuh, pembentukan BUMD itu juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Payakumbuh 2013-2017.

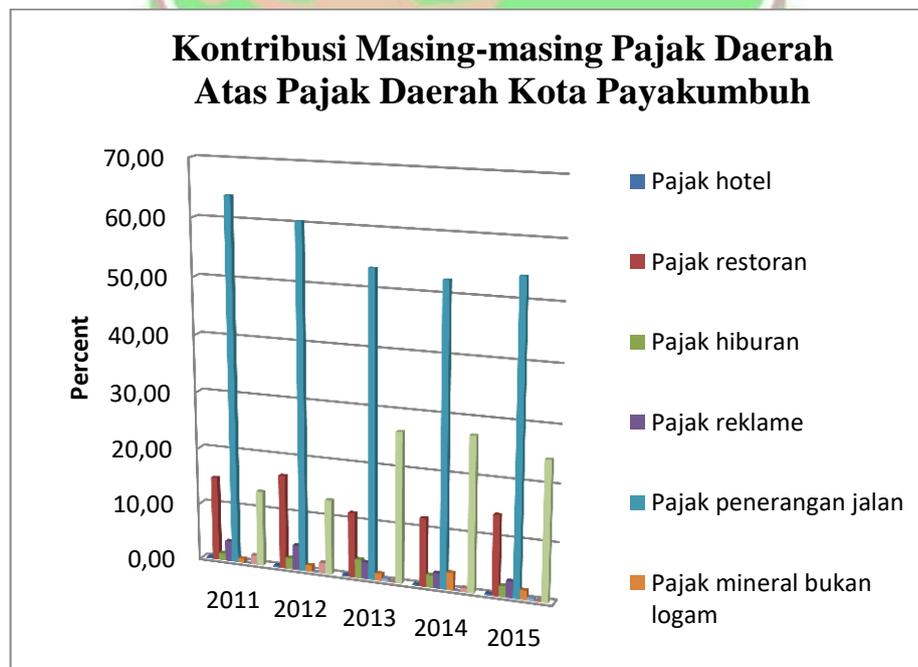
Dengan pembentukan BUMD, Kota Payakumbuh diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh. Perubahan target pendapatan daerah itu, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penyesuaian target penerimaan dari PAD setelah mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan realisasi PAD sampai dengan semester satu tahun 2015. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di perlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan yaitu Dinas Pendapatandan Pengelolaan Keuangan (DPPK)

Kota Payakumbuh yang sesuai fungsinya sebagai koodinator pemungutan pajak dan retribusi daerah dan koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi *real*, upaya ini dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun terus naik dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah pajak daerah. Daerah-daerah di Indonesia termasuk Payakumbuh mempunyai macam-macam pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian gol.c, pajak parkir, pajak air tanah, BPHTB. Masing- masing dari pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebagaimana yang tertera di grafik berikut:



Grafik 1.1



Sumber : *Data diolah dengan aplikasi statistik*

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwasanya kontribusi tertinggi dicapai oleh Pajak Penerangan Jalan yang memiliki rata-rata tertinggi diikuti BPHTB, Pajak Restoran dan Pajak Reklame masing-masing di urutan kedua, ketiga dan keempat.

Pajak reklame pada tahun 2011 hingga pada tahun 2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 3,62%. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 4,41% mengalami kenaikan, pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan tingkat kontribusi masing-masing menjadi 2,98% dan 2,71%. Pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 2,94%. Dari permasalahan tersebut timbul beberapa pertanyaan yakni, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Payakumbuh. Maka dalam hal ini peneliti mencari dan membandingkan dengan penelitian yang telah ada, dalam penelitian yang telah dilakukan sebagian besar faktor-faktor yang diambil adalah jumlah industri, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB, dan lain-lain. Maka pada penelitian ini penulis mengambil 3 faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi penerimaan pajak reklame, diantaranya jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB sektor industri. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA PAYAKUMBUH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh tahun 2006-2015.
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah industri, jumlah penduduk, PDRB sektor industri, penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh tahun 2006-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji perkembangan penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh tahun 2006-2015.
2. Untuk mengkaji pengaruh jumlah industri, jumlah penduduk, PDRB sektor industri, penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh tahun 2006-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah Kota Payakumbuh, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya tingkat penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan berguna sebagai salah satu informasi pengaruh pajak reklame terhadap PAD di Kota Payakumbuh .
3. Bagi Mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai penerimaan pajak reklame.

4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai efektifitas penerimaan pajak reklame dan pengaruhnya terhadap PAD di Kota Payakumbuh.
5. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. Latar belakang ini menjadi masukan bagi terbentuknya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian ini.

Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan beberapa variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, model penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, serta metode analisis data dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian melalui gambaran umum objek penelitian serta analisis data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan data dengan analisis regresi.

Bab V Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan penelitian serta implikasi kebijakan.

Bab VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

